

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Faisal dan Setiadi (2021:1), American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai; “Suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.” Dalam definisi menurut Faisal dan Setiadi (2021:1) mengandung beberapa pengertian:

- a. “Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi (Bagian ini menjelaskan tentang kegiatan akuntansi).
- b. Banwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan (Bagian ini menjelaskan kegunaan dari akuntansi).”

Pengertian akuntansi menurut Ibrahim (2016:19) adalah sebagai berikut: “Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan. Akuntansi disebut sebagai proses karena akuntansi memiliki input yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.”

Pengertian akuntansi menurut Purnairawan (2021:1), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap tansaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak

yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan”.

Pengertian akuntansi menurut Bahri (2020:1), adalah sebagai berikut: “Pengidentifikasian, pencatatan penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif dibidang ekonomi”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Bahari (2020:4-6) bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1) “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan secara periodik dengan perpedoman pada standar akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi atau pinjaman, pemahaman tentang posisi keuangan entitas, dan pemahaman tentang kinerja entitas dan arus kas.

2) Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan intern entitas atau manajemen sebagai perencanaan, pengendalian kegiatan entitas, penilaian kinerja entitas, dan menilai berbagai alternative dalam pengambilan keputusan bisnis.

- 3) Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan, pengukuran, pengalokasian, dan pelaporan informasi biaya produksi. Fungsi akuntansi biaya adalah penentuan harga pokok produksi, perencanaan, dan pengawasan biaya. Keluaran akuntansi biaya sebagai informasi biaya untuk pengambilan keputusan pihak manajemen.
- 4) Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal. Pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan maka untuk pelaporan perpajakan diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal.
- 5) Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*) Pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan entitas dengan penelusuran bukti-bukti secara objektif dari laporan keuangan dengan tujuan memberikan opini atau pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan kewajaran laporan keuangan untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah tersajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- 6) Akuntansi Penganggaran (*Budgeting Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan (penganggaran) untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang dengan tujuan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Penganggaran sebagai pengendalian yang bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan actual (realisasi) dengan laporan keuangan yang ditetapkan sebelumnya (anggaran).
- 7) Akuntansi Internasional (*International Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut transaksi internasional dan

penyajian laporan keuangan secara internasional, serta harmonisasi atas berbagai standar akuntansi. Akuntansi internasional meliputi kegiatan yang berhubungan dengan transaksi diluar negeri.

- 8) Akuntansi Sektor Publik (*Government Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya yang bertujuan untuk pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Tujuan organisasi nirlaba adalah bukan menghasilkan laba usaha. Ruang lingkup organisasi sektor publik, yaitu pemerintahan, yayasan sosial, perguruan tinggi, organisasi tempat peribadatan, panti jompo, dan organisasi publik nirlaba lainnya.
- 9) Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*) Akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan penyusunan sistem akuntansi entitas sehingga informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan lebih cepat, tepat, akurat, dan efektif. Sistem akuntansi sangat membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
- 10) Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*) Akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi dan pembuktian adanya kecurangan yang terjadi pada entitas. Akuntansi forensik merupakan formula yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.
- 11) Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) Akuntansi lingkungan muncul karena kurangnya pertimbangan dampak lingkungan dan konsekuensi keuangannya dalam akuntansi manajemen konvensional. Akuntansi

lingkungan adalah cabang akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan masalah lingkungan. Hampir sama dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dan Akuntansi Keuangan Lingkungan (AKL).”

2.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut PSAK00 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Paragraf 07 yaitu:

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Definisi laporan keuangan menurut Sulistyanto (2008:20) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan media yang dipakai perusahaan untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan itu selama satu periode tertentu. Laporan keuangan juga dipergunakan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh dari seluruh aktivitas perusahaan selama selama satu periode itu. Laporan keuangan pun dipergunakan untuk menginformasikan kondisi perusahaan pada saat tertentu sebagai akibat dari apa yang dilakukan dan dialaminya.”

Definisi laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2009) paragraf 9 adalah sebagai berikut:

“suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dimaksud adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media yang dipakai untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan juga menilai kinerja suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK00 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Paragraf 12-14 tujuan laporan keuangan yaitu:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK00 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Paragraf 24-39 terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. “Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu .

2. Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang

tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

- Penyajian Jujur Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Substansi Mengungguli Bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
- Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
- Pertimbangan Sehat Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

- Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan adalah pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.”

2.1.2.4 Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 00 adalah sebagai berikut:

1. “Posisi Keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Aktiva/ Aset Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.
 - b. Kewajiban/ Hutang Merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
 - c. Ekuitas/ Modal Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.
2. Kinerja Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan

dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya.

- a. Penghasilan (income) Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
- b. Beban (expenses) Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.”

2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan

Terdapat beberapa komponen yang ada didalam laporan keuangan dimana komponen tersebut wajib disertakan di dalam laporan yang menyeluruh. Laporan

keuangan yang lengkap dalam PSAK No. 1 (Revisi 2015) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca merupakan laporan yang menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Laporan posisi keuangan disajikan secara sistematis sehingga mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode merupakan ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu baik itu dari aktivitas utama perusahaan maupun dari aktivitas pendukungnya. Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dua pendekatan:
 - a. Laporan tunggal yaitu laporan komprehensif lain disajikan bersama dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi disajikan pertama kemudian diikuti oleh laporan penghasilan komprehensif lain.
 - b. Laporan terpisah yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Laporan laba rugi disajikan mendahului laporan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas Laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi dalam selama periode tertentu. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan harta perusahaan selama periode tertentu.
4. Laporan arus kas Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta bagaimana kas tersebut digunakan untuk kelancaran aktivitas perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Aktivitas operasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
 - b. Aktivitas investasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap perusahaan.
 - c. Aktivitas pendanaan yaitu laporan arus kas yang melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi pemilik, peminjaman dana dan pengambilan dana oleh pemilik
5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.
6. Informasi Komparatif PSAK No. 1 mengklasifikasikan informasi komparatif yang harus disajikan dalam laporan keuangan menjadi dua yaitu:
- a. Informasi komparatif minimum, yang menjelaskan bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan
 - b. Informasi komparatif tambahan, yang menjelaskan bahwa entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan

komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK.”

2.1.3 Teori Asimetri Informasi

2.1.3.1 Pengertian Asimetri

Informasi Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Scott (2003:105) sebagai berikut:
“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded hat another type of participant (buyers) does not know. When this situation exist, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Prasetya (2012:7) sebagai berikut:
 “Informasi Asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang”

Pengertian Asimetri Informasi menurut Supriyono (2018:192) sebagai berikut:

“Asimetri informasi adalah kondisi suatu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Atasan mungkin memiliki akses yang lebih terhadap informasi yang lebih luas dibandingkan bawahannya sehingga atasan memiliki informasi yang lebih baik. Namun mungkin

terjadi sebaliknya, bawahan lebih menguasai informasi unitnya dibandingkan atasannya”

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk mememanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

2.1.3.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Menurut Scott (2015:22-23), dua jenis asimetri informasi yaitu:

a. *“Adverse Selection*

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adverse selection adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

b. Moral Hazard

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfillment of the contract but other parties cannot”.

Berdasarkan pernyataan di atas, moral hazard adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.”

2.1.4 Good Corporate Governance

2.1.4.1 Definisi Good Corporate Governance

Di Indonesia konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan sejak tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pada tahun 2004 KNKCG berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP- 49/M.EKON./II.TAHUN 2004. Melalui

surat tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah diterapkan di tingkat internasional (Sopyan, 2021).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* (2004:11), pengertian *good corporate governance* adalah:

“... *Corporate governance is one key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and its shareholders and should facilitate effective monitoring. The presence of an effective corporate governance system, within an individual company and across an economy as a whole, helps to provide a degree of confidence that is necessary for the proper functioning of a market economy. As a result, the cost of capital is lower and firms are encouraged to use resources more efficiently, thereby underpinning growth.*”

Forum for Corporate Governance in Indonesian/ FFGI (2001:1) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *good corporate governance* dari Cadbury Committee, yaitu:

“*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101), *good corporate governance* adalah:

“... tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemamngku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sedangkan menurut Sutedi (2012:1), *good corporate governance* adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/ pemilik modal, komisaris/ dewan pengawas, dandireksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian *good corporate governance* menurut penulis adalah bagaimana hubungan antara manajemen perusahaan, para investor dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama menjalankan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:134), tujuan *good corporate governance* adalah:

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat.
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan *transparent*.”

2.1.4.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:106) adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.”

Selain itu, FCGI (2001) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* memiliki banyak manfaat bagi perusahaan antara lain:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.”

2.1.4.4 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

FCGI (2001:1) mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam penerapan *corporate governance* meliputi:

1. “Fairness (Keadilan)
Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparency (Transparansi)
Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.”

2.1.4.5 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

FCGI (2001:2) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. “Hak-hak para Pemegang Saham
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam *Corporate Governance*
4. Transparansi dan Penjelasan
5. Peranan Dewan Komisaris.”

2.1.4.6 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.4.6.1 Definisi Mekanisme *Coprorate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme

corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Yuono dan Widyawati, 2016).

Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidaklarasan kepentingan tersebut. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Selain itu, mekanisme *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemakai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Secara spesifik mekanisme *corporate governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit (Yuono dan Widyawati 2016).

Menurut Gideon (2005) dalam Sopyan (2021), mekanisme *corporate governance* adalah: "... suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan kegiatan yang ada dalam perusahaan."

2.1.4.6.2 Saham

a. Definisi Saham

Menurut Mohamad Samsul (2015:59), pengertian saham adalah:

"... tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham."

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:6), pengertian saham adalah: "... tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut."

Adapun pengertian saham menurut Fahmi (2016:271), adalah:

1. “Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap dijual.”

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian saham menurut penulis adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

b. Jenis Saham

Menurut Fahmi (2015:81), ada beberapa jenis saham diantaranya sebagai berikut:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:

- a. Saham biasa (common stock)

Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam pengertian lain saham merupakan efek yang paling sering digunakan oleh emiten dalam memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan efek yang paling dikenal di pasar modal.

Saham biasa memiliki karakteristik seperti:

- Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi.
- Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di RUPS.
- Hak tanggung jawab yang terbatas.
- Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.

b. Saham preferen (preferred stock)

Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) dan saham biasa, seperti obligasi yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
 - a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.
 - b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:

- a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- b. Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growthstock lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
- d. Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- e. Saham siklikal (counter cyclical stock), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.”

Dalam Fitria (2019), dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua pendekatan dasar yaitu:

1. “Analisis Fundamental

Analisis fundamental ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara:

- a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang.

- b. Menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis ini bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang fundamentalis mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi atau kinerja perusahaan. Argumentasi dasarnya adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan.

2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu.”

2.1.4.6.3 Keuntungan dan Risiko Saham

Nor Hadi (2013:70), keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu:

1. “Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
2. Capital Gain merupakan selisih positif antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.”

Sedangkan menurut Nor Hadi (2013:70), risiko yang diperoleh investor dengan membeli dan memiliki saham yaitu:

1. “Capital Loss merupakan kebalikan dari Capital Gain yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli.

2. Risiko Likuiditas dapat diartikan bahwa perusahaan yang sahamnya dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan.”

2.1.4.6.4 Kepemilikan Manajerial

a. Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Pasaribu dan Sulasmiyati (2016), kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Semakin besar kepemilikan saham pada pihak manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham, yaitu dirinya sendiri dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.”

Menurut Imanata dan Satwiko (2011:68), kepemilikan manajerial adalah:

“... saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga.”

Menurut Davies et. al. (2005) dalam Ruan, Tian dan Ma (2011), consider managerial ownership as:

“... having a stake in all board members’ shareholdings. Corporate boards have the power to make, or at least ratify, all important financial policies, and therefore it is plausible that board members with appropriate stock ownership have the incentive to provide effective monitoring and oversight of important corporate decisions.”

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial sebagai memiliki kepentingan dalam semua kepemilikan saham anggota dewan. Dewan perusahaan memiliki kekuatan untuk membuat, atau setidaknya meratifikasi, semua kebijakan keuangan penting, dan oleh karena itu masuk akal bahwa anggota dewan

dengan kepemilikan saham yang sesuai memiliki insentif untuk memberikan pemantauan dan pengawasan yang efektif atas keputusan perusahaan yang penting.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

b. Fungsi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

c. Tujuan Kepemilikan Manajerial

Tujuan dari kepemilikan manajerial adalah untuk menyelaraskan antara kepemilikan manajemen dan pemegang saham dengan alasan manajemen akan mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan untuk manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Manajer akan bertindak hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya (Jensen dan Meckling, 1976).

d. Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Adapun rumus kepemilikan manajerial yaitu menurut (Boediono, 2005) dalam Lestaringrum (2019):

$$\text{Persentase KM} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan (Purwaningtyas 2011). Selain itu, *Accounting Principal Board* (APB) dalam Fadillah (2017) menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham dibawah 20% dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan.

2.1.4.6.5 Kepemilikan Institusional

a. Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016:156), kepemilikan institusional adalah:

“... persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan.”

Menurut Rahmawati (2017:64), kepemilikan institusional adalah “... persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta.”

Menurut Silitonga (2012) Dalam Pratiwi (2018) Kepemilikan institusional berarti “... kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang dapat mengendalikan kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan.”

Selain itu menurut Subagyo (2018:47) dalam Wicaksono dan Sugiyanti

(2020)

“... kepemilikan institusional disuatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang didapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.”

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham atau persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional.

b. Fungsi Kepemilikan Institusional

Subagyo (2018:47) menyatakan bahwa:

“kepemilikan institusional disuatu perusahaan berfungsi sebagai pendorong dalam peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang didapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.”

Sedangkan Bushee dalam Boediono (2005) dalam Noviani (2017) menyatakan bahwa:

“kepemilikan institusional memiliki fungsi untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan opportunistik manajemen. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.”

c. Tujuan Kepemilikan Institusional

Tujuan dari kepemilikan institusional sendiri adalah untuk meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Jensen dan Meckling, 1976).

d. Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional

Perhitungan kepemilikan institusional dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Adapun rumus kepemilikan institusional menurut (Boediono, 2005) dalam Lestarinigrum (2019):

$$\text{Persentase KI} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan.

Ningrum dan Jayanto (2013:432) dalam Ramdhani (2018) menyatakan bahwa

“perusahaan dengan kepemilikan instusional dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki power dan experince serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.”

2.1.4.6.7 Komisaris Independen

a. Definisi Komisrais Independen

Berdasarkan Kep. 29/PM/2004, Komisaris Independen adalah:

“... anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.”

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110), komisaris independen adalah:

“... Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Sedangkan menurut Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto (2004:49), komisaris independen merupakan:

“komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

b. Fungsi Komisaris Independen

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa:

“non-executive director (komisaris independen) berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.”

Komisaris Independen pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan Komisaris. Hal yang membedakan adalah Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan atau terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas ataupun dengan Direksi perusahaan. Komisaris Independen berfungsi mengawasi Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor, stakeholders dan perusahaan itu sendiri (Prof. Pramono dan utami, 2007).

c. Tujuan Komisaris Independen

Tujuan komisaris independen yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak yang terkait dengan cara menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dia lakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Dewi dan Putra, 2016).

d. Tujuan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tugas Komisaris Independen tidak diatur secara rinci, akan tetapi secara umum tugas dari pada

komisaris termasuk juga komisaris independen adalah melakukan pengawasan atas kebijakan jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi.

Tugas yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut, Dewan Komisaris wajib:

1. “Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perserian lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.”

Sedangkan menurut Achmad Daniri dalam Sentosa Sembiring (2012:118) yang dikutip dari Andryanto (2021), bahwa dewan komisaris:

“... harus memiliki tanggung jawab dan wewenang mengawasi tindakan direksi. Bukan hanya itu, dewan komisaris juga berhak memberi nasihat kepada direksi jika sewaktu-waktu diperlukan. Dewan komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis, baik antara satu sama lain maupun terhadap direksi. Independen di sini berarti komisaris bukan sekedar rubberstamp dari direksi tetapi aktif dalam mempertimbangkan (review) bahkan mengkritisi (challenge) kebijakan strategis direksi.”

e. Metode Pengukuran Komisaris Independen

Rumus kepemilikan institusional menurut (Boediono, 2005) dalam Lestarinigrum (2019):

$$\text{Persentase DKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Proporsi komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Karena komisaris

independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen (Novianti 2017). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan, Pasal 20 Ayat 3 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, menurut Novianti (2017):

“Proporsi komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Karena komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen.”

2.1.4.6.8 Komite Audit

a. Definisi Komite Audit

Menurut James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi (2007:16), komite audit adalah:

“...pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal.”

Komite audit dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal (Yuono dan Widyawati, 2016).

b. Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 7, persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit antara lain:

1. “Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

- mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.”

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 10, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

d. Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 11, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. “Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.”

e. Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20), yakni:

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit BAB 2 pasal 4, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.5 Konservatisme Akuntansi

2.1.5.1 Definisi Konservatisme Akuntansi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52), yang menyatakan bahwa: “konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.”

Kemudian Suwardjono (2014) mendefinisikan konservatisme sebagai sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan

atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terburuk dari ketidakpastian tersebut.

Jenis Jenis Konservatisme Akuntansi Menurut Enni (2016:35) mengatakan bahwa konservatisme umumnya dipahami dalam dua jenis konservatisme yaitu ;

1. Unconditional Conservatisme adalah konservatisme yang berdasarkan akuntansi, terkait dengan neraca, dan tidak terkait atau bergantung pada terdapatnya berita (baik atau buruk)—artinya konservatisme jenis ini bersifat independen dari adanya berita baik atau berita buruk di lingkungan bisnis perusahaan. Konservatisme jenis ini menghasilkan earnings yang lebih persistent (konsisten dalam jangka panjang) karena konservatisme yang dilakukan terkandung dalam kebijakan akuntansi yang dilakukan, dimana konsistensi perlakuan akuntansinya relatif lebih konsisten. Konservatisme jenis ini misalnya adalah karena tidak melakukan pencatatan goodwill atau melakukan pembebanan yang relatif cepat terhadap aktivitas R&D, aktivitas pemasaran (periklanan) atau penggunaan metode pengalokasian yang bersifat akselerasi (depresiasi saldo menurun ganda), sehingga akibatnya dapat terjadi nilai buku aset yang understated.
2. Conditional Conservatism Konservatisme jenis ini adalah konservatisme yang berdasarkan kondisi pasar, terkait dengan earnings dan bergantung pada berita (news dependent), maksudnya adalah bahwa konservatisme bentuk ini merupakan reaksi atau tanggapan dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai penyerapan informasi yang terdapat dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi earnings perusahaan berkaitan keuangan karena manajer dapat menentukan timing dan jumlah dari asset write-down atau

restructuring charges yang diakui. Dalam hal ini, efek dari konservatisme kondisional terhadap aliran earnings dapat kurang persistent (konsisten dalam jangka panjang) dan lebih sulit bagi investor untuk mendeteksi konservatisme jenis ini (Enni, 2016: 37).

Dengan informasi yang dapat berakibat pada terdapatnya gains dan losses ekonomis. Akuntansi bersifat konservatif bila pengakuan terhadap berita yang mengindikasikan adanya losses ekonomis lebih tepat waktu (timely) dibandingkan pengakuan terhadap gains ekonomis dan dapat juga mencakup suatu tingkat tertentu dari diskresi manajerial yang dilakukan oleh seorang manajer yang tercermin didalam laporan.

2.1.5.2 Manfaat Konservatisme Akuntansi

- a. Akuntansi Konservatisme Tidak Bermanfaat Meskipun prinsip konservatisme telah di akui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut.

Stabus (1995) dalam Mayangsari dan wilopo (2002) berpendapat adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan konservatisme merupakan kelemahan konservatisme. Disamping itu, konservatisme dianggap sebagai suatu sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini diipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan terendah dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

- b. Akuntansi Konservatisme Bermanfaat Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (agency conflict).

Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditora dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly dan Hayn, 2002 dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002).

Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki value relevance. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Berikut metode pengukuran konservatisme akuntansi (Givoly dan Hayn, 2000)

$$\text{KAit} = \text{Nlit} - \text{CFOit} \times (-1)$$

Perusahaan dikatakan memiliki tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi jika nilai $\text{KAit} \geq 0$. Hal ini dikarenakan laba yang tercantum di dalam laporan keuangan lebih besar dibandingkan kas yang tersedia untuk kegiatan operasional. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki nilai $\text{KAit} < 0$ maka perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang rendah.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset (Kusuma, 2014).

Menurut Prasetyorini (2013:186) ukuran perusahaan adalah:

“... suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain”.

Menurut Ernawati (2015) mengemukakan tentang ukuran perusahaan yaitu:

“... ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualannya, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset, maka semakin besar modal yang ditanam. Sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan”.

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Puspitasari dan Jogi, 2013).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan total aset atau total penjualan. Besar kecilnya perusahaan juga turut menentukan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang menjelaskan dalam beberapa macam sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2013:23), yang dimaksud pengukuran ukuran perusahaan adalah:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (\ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

Menurut Werner R. Murhadi (2013), firm size adalah:

“... diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan Log Natural Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset

dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya”.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan (Lindira, 2014 dalam Lubis dan Suryani, 2018), yakni sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan =

Total Asset

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006), ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun.

Ukuran Perusahaan =

Total Penjualan Bersih

Tabel 2. 1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Total asset	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	2,5 Milyar-50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

2.1.7 Laba

2.1.7.1 Definisi Laba

Pengertian laba menurut Suwardjono (2014:464):

“Laba adalah kenaikan aset dalam suatu perioda akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula.”

Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Suwardjono (2014:455) berpendapat:

“Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintatik karena laba tidak didefinisikan secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba sehingga orang harus mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memakai laba. Jadi, laba merupakan hasil penerapan prosedur bukan sesuatu yang bermakna semantik.”

2.1.7.2 Konsep Laba

Konsep laba menurut Suwardjono (2014:458) dapat dijelaskan dalam tiga tingkatan, yaitu sintatik, semantik dan pragmatik. Berikut penjelasan secara rinci konsep laba pada tingkatan tersebut:

1. “Konsep Laba pada Tingkat Semantik Pada tingkatan semantik digunakan tiga konsep ekonomi sebagai berikut:
 - a. Laba sebagai pengukur efisiensi Laba sebagai pengukur efisiensi mengandung makna bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk guna memungkinkan imbalan semaksimal mungkin bagi pemilik.
 - b. Laba Akuntansi dan laba ekonomi Laba akuntansi digunakan bukan sebagai pengganti laba ekonomi, tetapi sebagai penyedia informasi kepada pasar agar memungkinkan investor menghitung laba ekonomi.
 - c. Laba Banyak Orang Laba akuntansi digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian asumsi antara pihak- pihak yang berkepentingan.
2. Konsep Laba pada Tingkat Sintatik Pada tingkatan sintatik digunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan transaksi dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan ini, pencatatan laba melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian kewajiban hanya bila ini merupakan hasil dari transaksi internal dan eksternal.
 - b. Pendekatan Kegiatan atau Aktivitas dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan aktivitas, laba diasumsikan timbul bila aktivitas-aktivitas atau kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil dari transaksi spesifik.
3. Konsep Laba pada Tingkat Pragmatik Konsep pragmatik laba berkaitan dengan proses keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga sekuritas dalam pasar yang teratur terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dan manajemen, dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan.
- a. Laba sebagai Alat Peramal Laba sering digunakan untuk membantu mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba, meramalkan laba masa depan atau menetapkan risiko investasi dan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Laba akuntansi juga digunakan untuk mengambil keputusan manajerial.
 - b. Pendekatan Pasar Modal Pengamatan langsung dan tak langsung menyatakan bahwa laba per saham yang dilaporkan mempunyai dampak langsung pada harga pasar saham biasa dan dalam permintaan oleh masing-masing investor, meskipun hipotesis pasar yang efisien menyiratkan bahwa perorangan tidak dapat memperoleh pengetahuan dari informasi ini. Akan tetapi, dalam bentuk Efficient market Hypothesis semikuat, penggunaan kandungan informasi dari laba merupakan dasar reaksi pasar terhadap

informasi ini. Konsep laba yang digunakan oleh akuntan adalah laba akuntansi (accountancy income).”

2.1.7.3 Jenis-Jenis Laba

Laba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Zaki Baridwan (2004:34):

1. “Laba Kotor: selisih positif antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan (HPP). Laba ini belum dikurangi dengan biaya operasional dalam satu periode tertentu.
2. Laba Bersih Operasional: laba kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan dan semua biaya dalam kegiatan usaha.
3. Laba Bersih Sebelum Pajak: pendapatan perusahaan sebelum pajak, atau perolehan operasional dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lainnya.
4. Laba Bersih Setelah Pajak: laba yang diperoleh setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak.”

2.1.8 Manajemen Laba

2.1.8.1 Definisi Manajemen Laba

Menurut Schipper (1989) dalam Sri Sulistyanto, (2008:42) manajemen laba adalah:

“Earning management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain a opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan

eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)).

Menurut Sri Sulistyanto, (2008:6) manajemen laba didefinisikan sebagai:

“... upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan”.

Definisi manajemen laba menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987)

dalam Sri Sulistyanti (2008:42) yaitu:

“Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan).”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut diantaranya untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja perusahaan agar terlihat baik, atau perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah dengan cara menurunkan laba perusahaan.

2.1.8.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sulistyanto (2008:63-64).

1. “Bonus Plan Hypothesis Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi

yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

2. Debt Covenant Hypothesis Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.
3. Political Cost Hypothesis Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan”

2.1.8.3 Model Dasar Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:177), terdapat tiga pola dalam manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. “Penaikkan Laba (Income Increasing) Pola penaikan laba (income increasing) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan 80 periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. Penurunan Laba (Income Decreasing) Pola penurunan laba (income decreasing) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
3. Perataan Laba (Income Smoothing) Pola perataan laba (income smoothing) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.” Sedangkan menurut Scott (2003:405), terdapat empat bentuk manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. *“Taking a bath This can take place during periods of organizational stress or reorganization. If a firm must report a loss, management may feel it might as well report a large one-it has little to lose at this point. Consequently, it will*

write-off assets, provide for expected future costs, and generally "clear the decks." Because of accrual reversal, this enhances the probability of future reported profits. In effect, the recording of large write-offs puts future earnings "in the bank.

2. *Income Minimization This is similar to taking a bath, but less extreme. Such a pattern may be chosen by a politically visible firm during periods of high profitability. Policies that suggest income minimization include rapid write-offs of capital assets and intangibles, expensing of advertising and R&D expenditures, successful-efforts accounting for oil and gas exploration costs, and so on. Income tax considerations, such as for LIFO inventory in the United States, provide another set of motivations for this pattern, as does enhancement of arguments for relief from foreign competition.*
3. *Income Maximization From positive accounting theory, managers may engage in a pattern of maximization of reported net income for bonus purposes, providing this does not put them above the cap. Firms that are close to debt covenant violations may also maximize income.*
4. *Income Smoothing* ⁸¹ *This is perhaps the most interesting earnings management pattern. From a contracting perspective, risk-averse managers prefer a less variable bonus stream, other things equal. Consequently, managers may smooth reported earnings over time so as to receive relatively constant compensation. Efficient compensation contracting may exploit this effect, and condone some income smoothing as a lowcost way to attain the manager's reservation utility."*

2.1.8.4 Model Empiris Manajemen Laba

Ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulistyanto (2008:211-216) yaitu:

1. “Model Berbasis Aggregate Accrual Model berbasis Aggregate Accrual yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary accrual Sebagai proksi manajemen laba.
2. Model Berbasis Specific Accruals Model kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (specific accruals), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.
3. Model Berbasis Distribution Of Earnings After Management. Model Berbasis Specific Accruals yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.”

2.1.8.5 Metode Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyano (2008: 216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba. Pertama kali dikembangkan oleh Healy, De Angelo, model Jones serta model Jones Modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain :

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai *total accrual* (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode berangkutan.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata *total accrual* (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{T}$$

Dimana:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = *Total accrual* yang diskala dengan total aktiva periode *t-1*.

T = 1, 2,*T* merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara *total accrual* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accrual* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata *total accrual* (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

$NDCAt$ = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

$TACt$ = *Total accrual* periode t .

TA_{t-1} = total aktiva periode $t-1$.

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara *total accrual* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari

pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II : Menghitung nilai nondiscretionary accruals dengan rumus diatas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TAC_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TAC_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta REV_{i,t}}{TAC_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \Sigma$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan I periode t-1

$REV_{i,t}$ = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap perusahaan i periode t

Selain itu menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai berikut :

$$NDA = \alpha_1 \frac{1}{AT_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan i periode t

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = Firm-specific parameters

Langkah 3: Menghitung nilai discretionary accruals (TAC) dan nondiscretionary accruals (NDA). Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Dimodifikasi

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan

$$TAC = NI_{i,t} - CFO_{i,t}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan *Ordinary Least Square* dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{i,t}}{TAC_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TAC_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \sum u$$

Langkah II : Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *Non Discretionary Accruals* ditentukan sebagai berikut:

$$NDA = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Langkah III : terakhir untuk menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut:

$$DTA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Dalam hal ini penulis menggunakan kriteria menurut Muid (2005) dalam Pradana (2020) jika nilai $DTA > 0$ maka perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika $DTA \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu Manajemen Laba. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

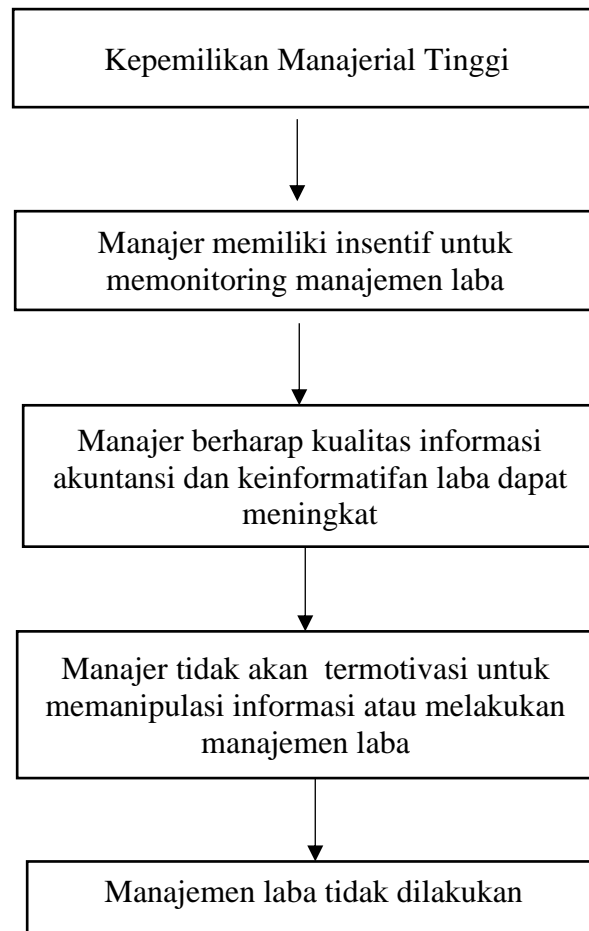
Shleifer dan Vishny (1997) dalam Budi Susilo (2010), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor manajemen laba. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Pandangan berdasarkan *alignment effect* yang mengacu pada kerangka Jensen dan Meckling (1976) dalam Bayu (2010) yang menyatakan bahwa penyatuan kepentingan (*convergence of interest*) antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik keagenan akan berkurang sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kemakmuran pemegang saham.

Dalam Febrianto (2005), manajer yang memiliki akses terhadap informasi perusahaan akan memiliki inisiatif untuk memanipulasi informasi tersebut jika mereka merasa informasi tersebut merugikan kepentingan mereka. Namun jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai *discretionary accruals*. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Fatma (2010), Ismalia Asward (2015), Maulana, (2017), I Dewa Gede (2014), dan Widyastuti (2009) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen menurut Chung et al (2003) dalam Purwandari (2011). Investor institusional dengan kepemilikan saham dalam jumlah besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai

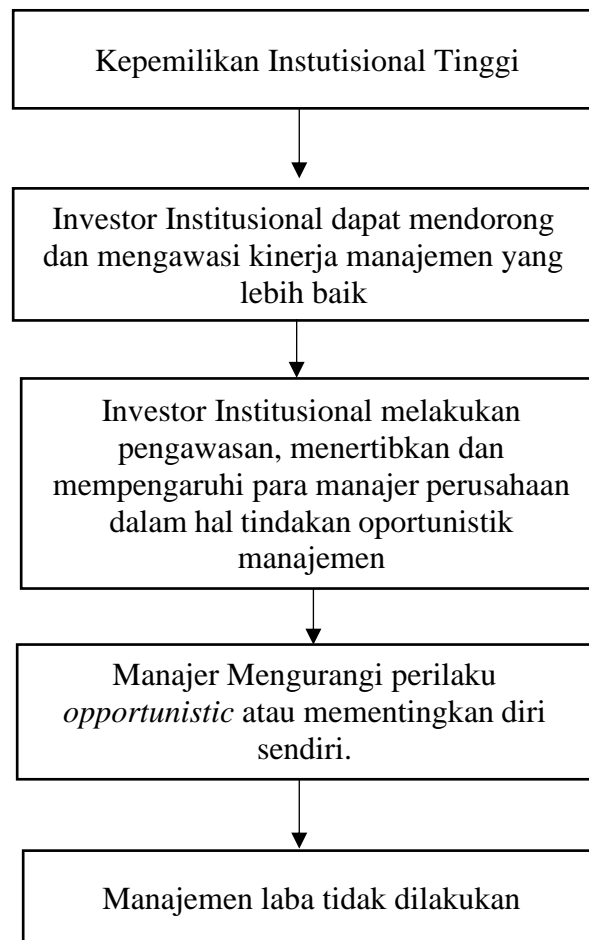
kepemilikan saham dalam jumlah yang relatif rendah, maka para investor institusional hanya memiliki sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajer. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Dalam Fidyati (2004), Shiller dan Pound menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer.

Suranta dan Midiastuty (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen, oleh karena itu manajer akan menghindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raras Mahiswari dan Paskah Ika Nugroho (2014), Subhan (2011), Widyastuti (2007), dan Ismalia Asward (2015) dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

2.2.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak menurut KNKG (2006) dalam Bayu (2010).

Secara lebih luas tugas komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan

nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan dalam Alijyo dkk (2004) dalam Bayu (2010).

Manajemen laba pada perusahaan terjadi karena adanya *conflict of interest* yang dimiliki antara agen dan principal. Dalam hal ini komisaris independen dapat meminimalisir *conflict of interest* karena akan bersikap objektif dalam pengambilan keputusan, dimana komisaris independen akan memberi masukan jika terjadi penyimpangan pengelolaan usaha sehingga *adverse selection* dan *moral hazard* dapat dihindari.

Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun.

Fama dan Jensen dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Secara umum, dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan

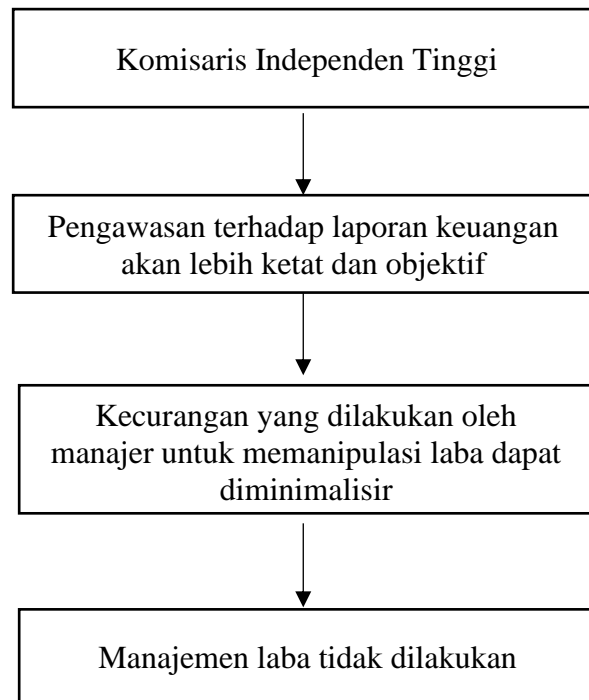
yang dilakukan manajer.

Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak *opportunistic*.

Menurut Cornett dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), jika anggota dewan komisaris meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya *discretionary accruals*, sehingga diharapkan kualitas laba juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afifa Daljono (2013) dan Ismalia Asward (2015) yang menyatakan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka manajemen laba akan semakin berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017), Bayu Ftama (2010), Afifa Daljono (2013) dan Ismalia Asward (2015) dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

2.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Bayu (2010) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan, *discretionary accruals* semakin rendah, yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu :

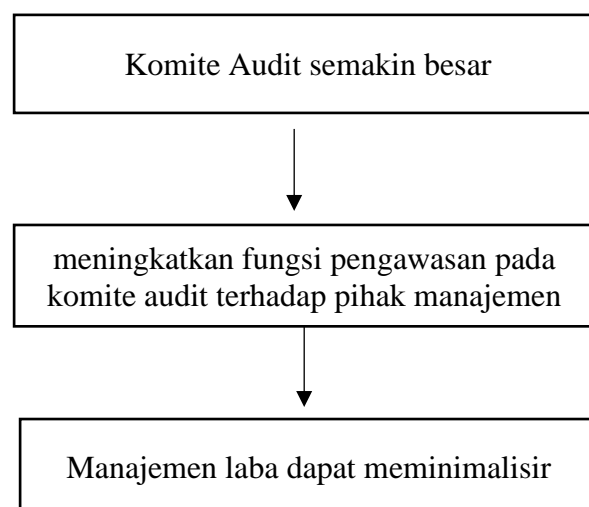
- a. berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat,
- b. berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan
- c. berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut KNKG dalam

Gradiyanto (2012), untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yushita, Rahmawati dan Triatmoko (2013:150), Bayu Fatma (2010) dan Ismalia Asward (2015) dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh komite Audit terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2. 4
Kerangka Pemikiran Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

2.2.6 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba

Salah satu variabel yang dapat mengurangi konflik keagenan adalah konservatisme akuntansi (Tuwentina dan Wirama, 2014). Dalam teori keagenan,

konservatisme akuntansi dianggap dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Beberapa peneliti menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki peranan dalam teori keagenan untuk penentuan praktik yang paling efisien yang dapat membatasi konflik atau masalah keagenan. Menurut Kazemi et al. (2011), prinsip konservatisme pada dasarnya dianggap sebagai keuntungan karena dapat meminimalisir pandangan optimistis pihak manajemen dan menghindari sikap yang cenderung berlebihan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada praktiknya agen dalam aktifitasnya seringkali tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat dengan prinsipal, dimana agen lebih cenderung untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Teori Akuntansi Positif dapat diartikan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu serta menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah baik itu bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Teori akuntansi positif berargumentasi bahwa untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya kontrak, perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang ada (Narolita dan Krisnadewi, 2016).

Oleh karena itu, pemilihan prosedur akuntansi yang digunakan oleh setiap perusahaan tidaklah harus sama. Hal tersebut membuat manajer cenderung melakukan suatu tindakan yang menurut teori ini disebut tindakan oportunistis. Tindakan oportunistis manajer terjadi karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agendan prinsipal, sehingga agen berpeluang untuk melakukan tindakan manajemen laba. Manajer cenderung untuk menggunakan pemilihan kebijakan akuntansi yang tidak konservatif (optimis) karena

konservatisme dianggap dapat membatasi tindakan oportunistik manajer. Prinsip konservatisme yang cenderung berpihak serta melindungi investor dari kesalahan pengambilan keputusan akibat kesalahan dalam menganalisis informasi laba, membuat konservatisme akuntansi menjadi halangan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Konservatisme akuntansi dapat berperan dalam teori keagenan untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manajemen laba.

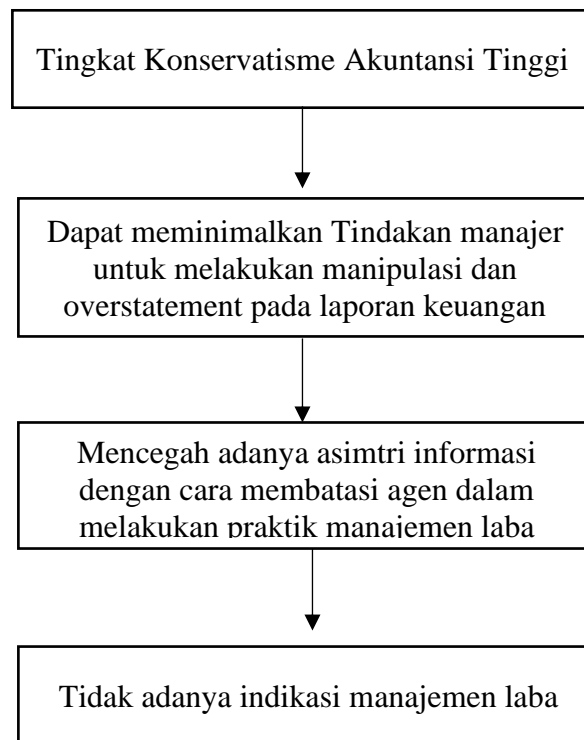
Konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Konservatisme merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi biaya benturan kepentingan antara manajer dan pemilik, dan ketidakpastian kondisi akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan, tujuan utama konservatisme adalah untuk mencegah keputusan yang salah oleh investor, kreditor dan pengguna laporan keuangan lainnya (Beghari, 2013). Menurut Watts (2003), akuntansi konservatif bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi antara investor dan kreditor karena konservatisme akuntansi dapat mencegah pembagian dividen yang berlebihan kepada investor. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip konservatisme yang berpihak kepada investor dengan cenderung bersifat melindungi investor dari kesalahan berinvestasi akibat kekeliruan dalam menganalisis informasi laba perusahaan (Tuwentina dan Wirama, 2014). Jika dikaitkan dengan manajemen laba, manajer perusahaan cenderung menggunakan akuntansi yang tidak konservatif (optimis) karena konservatisme akuntansi dinilai dapat membatasi tindakan oportunistik manajer (Anggraini dan Trisnawati, 2008).

Semakin tinggi konservatisme akuntansi, dapat meminimalkan tindakan manajer untuk melakukan manipulasi dan overstatement pada laporan

keuangan (Prabaningrat dan Widanaputra, 2015). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kazemi et al. (2011) yang juga menyatakan bahwa prinsip konservatisme dianggap sebagai keuntungan karena dapat meminimalisir sifat optimis pihak manajemen dan menghindari sikap yang cenderung berlebihan dalam laporan keuangan. Soraya dan Harto (2014) menyimpulkan bahwa variabel konservatisme akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif, nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa manajemen menggunakan pola manajemen *income decreasing*, yaitu melaporkan laba lebih rendah pada periode saat ini untuk mendapatkan laba yang lebih besar pada periode mendatang. Oleh karena itu jika dilakukan manajemen laba, konservatisme akuntansi akan menjadi halangan bagi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagheri et al., (2013), J.A.Molenaar (2009), dan Soraya dan Harto (2014) dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2. 5
Kerangka pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

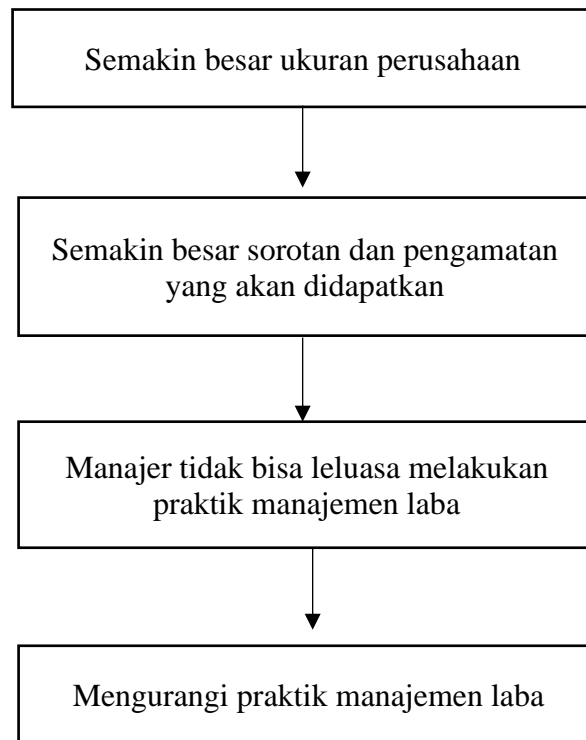
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada total aktiva suatu perusahaan, semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba yaitu berupa pengawasan dan pengamatan terkait kinerja tersebut, semakin besar perusahaan maka semakin besar sorotan dan pengamatan yang akan didapat perusahaan, sehingga manajer tidak bisa leluasa melakukan praktik manajemen laba mengingat jika perusahaan mengalami kerugian atau bahkan terbukti melakukan kecurangan maka akan berdampak merugikan citra perusahaan baik internal maupun eksternal. (Prasetya,2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Irene Natalia (2009) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang memiliki aset besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar yang umumnya mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para analis, investor, maupun pemerintah. Untuk itu, perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis. Oleh karena itu, perusahaan besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diastiti Okkarisma Dewi (2010) berpendapat ukuran perusahaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba. Bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firnanti (2017), Arthawan dan Wirasedana (2018), Hendra et al. (2018), Wardani dan Santi (2018), Mahawyahrti dan Budiasih (2016), Purnama (2017), Wildham Besti vano (2013), Irene Natalia (2009), Kris Brantas Abiprayu (2011) dan Hafidza Ulfa Almadara (2007) dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2. 6
Kerangka pemikiran Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2018:63) dalam Pratiwi (2020), hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

Menurut Jonathan Sarwono (2017:13), hipotesis merupakan:

“... dugaan atau saran mengenai karakteristik atau sifat-sifat fakta yang dapat terjadi yang dianggap sebagai suatu permulaan dalam penyelidikan ilmiah.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen.

Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

H4 : Komite Audit berpengaruh terhadap negatif manajemen laba

H5 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba